

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja Walikota Bukittinggi Erman Safar, S.H. bersama Wakil Walikota Bukittinggi H. Marfendi dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Adapun Capain Kinerja Makro Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.  
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capain Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,7	0,149%
2.	Angka Kemiskinan	4,54	5,14	13,216%
3.	Angka Pengangguran	7,51	6,09	-18.908%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,74	3,61	307.47%
5.	Pendapatan Per Kapita	71.39	74.24	3.992%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,265	0,286	7,92%

Sumber: BPS Sumatera Barat

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial

Tabel 2.  
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)  
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data						
1	2	3	4	5						
1.	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</td> <td>3386</td> <td rowspan="2">x 100% =</td> <td rowspan="2">71%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Bukittinggi</td> <td>4750</td> </tr> </table>	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	3386	x 100% =	71%	Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Bukittinggi	4750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	3386	x 100% =	71%					
		Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Bukittinggi	4750							
2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</td> <td>13507</td> <td rowspan="2">x 100% =</td> <td rowspan="2">92%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kota Bukittinggi</td> <td>14758</td> </tr> </table>	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	13507	x 100% =	92%	Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kota Bukittinggi	14758	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	13507	x 100% =	92%							
Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kota Bukittinggi	14758									
3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</td> <td>7390</td> <td rowspan="2">x 100% =</td> <td rowspan="2">98%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Bukittinggi</td> <td>7534</td> </tr> </table>	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	7390	x 100% =	98%	Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Bukittinggi	7534	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	7390	x 100% =	98%							
Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Bukittinggi	7534									

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		<p>4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <hr/> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Bukittinggi</p>	<p>400</p> <p>21790</p> <p>x 100% = 1,84%</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	<p>1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</p> <p>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan</p> <hr/> <p>Jumlah Penduduk di Kota Bukittinggi</p>	<p>842</p> <p>130773</p> <p>x 100% = 0,64%</p>	Dinas Kesehatan
		<p>2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi</p> <p>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</p> <hr/> <p>RS di Kota Bukittinggi</p>	<p>5</p> <p>6</p> <p>x 100% = 83,3%</p>	Dinas Kesehatan
		<p>3 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <hr/> <p>Jumlah ibu hamil di Kota Bukittinggi</p>	<p>1932</p> <p>1995</p> <p>x 100% = 96,8%</p>	Dinas Kesehatan
		<p>4 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan</p> <p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</p> <hr/> <p>Jumlah ibu bersalin di Kota Bukittinggi</p>	<p>1739</p> <p>1905</p> <p>x 100% = 91,3%</p>	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		5 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar <hr/> Jumlah bayi baru lahir di Kota Bukittinggi	1739 $\times 100\% = 93,3\%$ 1863	Dinas Kesehatan
		6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar <hr/> Jumlah balita di Kota Bukittinggi	5805 $\times 100\% = 60,8\%$ 9542	Dinas Kesehatan
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar <hr/> Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Bukittinggi	4276 $\times 100\% = 90,6\%$ 4717	Dinas Kesehatan
		8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar <hr/> Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Bukittinggi	34753 $\times 100\% = 54\%$ 64913	Dinas Kesehatan
		9 Persentase warga Negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar <hr/> Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Bukittinggi	10206 $\times 100\% = 88.70\%$ 11506	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data								
1	2	3	4	5								
		10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</td> <td>8164</td> <td>x 100% =</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penderita hipertensi di Kota Bukittinggi</td> <td>31866</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8164	x 100% =	26%	Jumlah penderita hipertensi di Kota Bukittinggi	31866			Dinas Kesehatan
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8164	x 100% =	26%									
Jumlah penderita hipertensi di Kota Bukittinggi	31866											
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</td> <td>713</td> <td>x 100% =</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penderita DM di Kota Bukittinggi</td> <td>806</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713	x 100% =	88%	Jumlah penderita DM di Kota Bukittinggi	806			Dinas Kesehatan
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	713	x 100% =	88%									
Jumlah penderita DM di Kota Bukittinggi	806											
		12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</td> <td>169</td> <td>x 100% =</td> <td>88,94%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penderita ODGJ di Kota Bukittinggi</td> <td>190</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	169	x 100% =	88,94%	Jumlah penderita ODGJ di Kota Bukittinggi	190			Dinas Kesehatan
Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	169	x 100% =	88,94%									
Jumlah penderita ODGJ di Kota Bukittinggi	190											
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</td> <td>288</td> <td>x100% =</td> <td>31,37%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penderita TBC di Kota Bukittinggi</td> <td>916</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	288	x100% =	31,37%	Jumlah penderita TBC di Kota Bukittinggi	916			Dinas Kesehatan
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	288	x100% =	31,37%									
Jumlah penderita TBC di Kota Bukittinggi	916											
		14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	<table border="0"> <tr> <td>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</td> <td>1257</td> <td>x100% =</td> <td>21,47%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Bukittinggi</td> <td>5854</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1257	x100% =	21,47%	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Bukittinggi	5854			Dinas Kesehatan
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1257	x100% =	21,47%									
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Bukittinggi	5854											

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		HIV sesuai standar		
3.	Pekerjaan Umum	1 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kota Bukittinggi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan Kota Bukittinggi}} \times 100\% = 66,56\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Bukittinggi}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Bukittinggi}} \times 100\% = 84,92\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3 Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Bukittinggi}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	
1	2	3	4	5	
		5 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<p>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi</p> <p>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>	<p>24 x 100% = 100%</p> <p>24</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat	1 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	<p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p>	<p>1,43 ha x 100% = 30,43%</p> <p>4,77 ha</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	<p>Jumlah pengaduan yang ditangani</p> <p>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</p>	<p>2.256 x 100% = 96%</p> <p>2.348</p>	Satuan komunikasi Pamong Praja
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</p> <p>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</p>	<p>2 x 100% = 100%</p> <p>2</p>	Satuan komunikasi Pamong Praja
		3 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		117.079	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
		4 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	116.725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.613 Jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran <p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Bukittinggi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Bukittinggi</p> $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$ <p>Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bukittinggi</p>	36	Dinas Kebakaran
		7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4,8 Menit	Dinas Kebakaran
6.	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> $\frac{820}{820} \times 100\% = 100\%$ <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan</p>	820	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	
1	2	3	4	5	
		pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	pengemis		
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <hr/> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Bukittinggi</p>	<p>346 x 100% = 100%</p> <p>346</p>	Dinas Sosial

### 3. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 menyatakan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Tabel 3.  
REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
PENDAPATAN DAERAH	684,347,061,146.00	688,635,054,453.61	100.63
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92,110,528,556.00	91,786,288,185.61	99.65
Pajak Daerah	37,070,692,210.00	40,765,025,893.00	109.97
Pajak Hotel	9,942,545,931.00	12,296,289,161.00	123.67
Pajak Hotel	9.939.245.931,00	12.292.206.661,00	123.67
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.300.000,00	4.082.500,00	123.71
Pajak Restoran	6,433,694,475.00	6,052,919,004.00	94.08
Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.807.219.575,00	5.594.370.550,00	96.33
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	300.899.250,00	291.877.406,00	97.00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	325.575.650,00	166.671.048,00	51.19
Pajak Hiburan	612,767,023.00	712,031,108.00	116.20
Pajak Tontonan Film	14.625.000,00	0,00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.887.958,00	343.000,00	7.02
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.498.710,00	814.500,00	4.94
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	561.745.294,00	703.788.970,00	125.29
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran(Fitness Center)	15.010.061,00	7.084.638,00	47.20
Pajak Reklame	500,000,000.00	648,480,050.00	129.70
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	406.124.363,00	608.981.750,00	149.95
Pajak Reklame Kain	67.491.512,00	30.798.300,00	45.63
Pajak Reklame Berjalan	26.384.125,00	8.700.000,00	32.97
Pajak Penerangan Jalan	5,800,191,430.00	5,902,665,599.00	101.77
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5,800,191,430.00	5,902,665,599.00	101.77
Pajak Parkir	292,088,535.00	298,836,265.00	102.31
Pajak Parkir	292,088,535.00	298,836,265.00	102.31
Pajak Air Tanah	66,977,531.00	69,419,188.00	103.65

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Pajak Air Tanah	66,977,531.00	69,419,188.00	103.65
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3,200,000,000.00	3,768,254,822.00	117.76
PBBP2	3,200,000,000.00	3,768,254,822.00	117.76
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,222,427,285.00	11,016,130,696.00	107.76
BPHTB-Pemindahan Hak	10.222.427.285,00	10.773.486.121,00	105.39
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	242.644.575,00	0.00
Retribusi Daerah	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107.00
Retribusi Jasa Umum	6,025,992,500.00	5,943,255,352.00	98.63
Retribusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	493.338.000,00	123.33
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.489.058.500,00	1.251.957.040,00	84.08
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	4.675.000,00	93.50
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.274.934.000,00	1.193.391.000,00	93.60
Retribusi Pelayanan Pasar	975.000.000,00	1.194.622.812,00	122.53
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi	1.700.000.000,00	1.720.804.000,00	101.22
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	10.107.500,00	101.08
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000,00	74.360.000,00	43.23
Retribusi Jasa Usaha	19,051,277,420.00	20,997,071,142.00	110.21
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190.000.000,00	138.576.300,00	72.93
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.455.587.420,00	2.055.531.348,00	83.71
Retribusi Terminal	191.656.000,00	179.782.000,00	93.80
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.982.034.000,00	1.495.068.000,00	75.43
Retribusi Rumah Potong Hewan	216.000.000,00	236.398.000,00	109.44
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.950.000.000,00	16.810.153.684,00	120.50
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	66.000.000,00	81.561.810,00	123.58
Retribusi Perizinan Tertentu	532,000,000.00	461,553,837.00	86.76
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	437.483.837,00	87.50
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	32.000.000,00	24.070.000,00	75.22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	5,482,031,608.00	5,482,031,608.00	100.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
pada BUMD			
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah	23.948.534.818,00	18.137.350.353,61	75.73
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	114,186,000.00	143,235,768.00	125.44
Hasil Penjualan Aset Lainnya	114,186,000.00	143,235,768.00	125.44
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5,625,000,000.00	453,968,151.00	8.07
Hasil Sewa BMD	4.825.000.000,00	306.262.000,00	6.35
Hasil dari Bangun Guna Serah	800.000.000,00	147.706.151,00	18.46
Jasa Giro	3,300,000,000.00	3,562,919,442.00	107.97
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.300.000.000,00	3.317.616.577,00	100.53
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	127.228.631,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	7.698,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	109.253.930,00	0,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.812.606,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Pendapatan Bunga	4,000,000,000.00	4,820,064,660.75	120.50
Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,820,064,660.75	120.50
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	63,734,680.22	0.00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	63,734,680.22	0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	48,335,970.96	0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	48,335,970.96	0.00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	20,000,000.00	346,170,657.00	1730.85
Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.000.000,00	59.468.107,00	1189.36
Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.000.000,00	18.978.681,00	189.79
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.315.043,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	566.941,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	105.781,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000,00	265.736.104,00	5314.72
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	41,939,623.00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	10.799.101,00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	29.376.622,00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	1.763.900,00	0.00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0.00	166,712,567.39	0.00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0.00	166,712,567.39	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	0.00	2,109,268,996.29	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	120.367.526,00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	4.214.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	1.984.687.470,29	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	10,859,348,818.00	6,217,252,737.00	57.25
Pendapatan BLUD	10,859,348,818.00	6,217,252,737.00	57.25
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	30,000,000.00	397,100.00	1.32
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30,000,000.00	397,100.00	1.32
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0.00	163,350,000.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	163.350.000,00	0.00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>592.236.532.590,00</b>	<b>593.762.137.738,00</b>	<b>100.26</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	562,370,143,182.00	561,086,880,504.00	99.77
Dana Perimbangan	516,838,587,182.00	515,555,324,504.00	99.75
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.798.713.382	19.297.898.290,	130.40
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	421.334.282.000,00	421.334.282.000,00	100.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	21.199.145.000,00	17.828.812.263,00	84.10
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.506.446.800,00	57.094.331.951,00	95.95
Dana Insentif Daerah (DID)	45,531,556,000.00	45,531,556,000.00	100.00
DID	45.531.556.000,00	45.531.556.000,00	100.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109.40
Pendapatan Bagi Hasil	29,866,389,408.00	32,675,257,234.00	109.40
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109.40

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	3.086.628.530,00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	3,086,628,530.00	0.00
Lain-lain Pendapatan	0.00	3,086,628,530.00	0.00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	3.086.628.530,00	0.00

Tabel 4.  
REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
BELANJA DAERAH	783.759.843.834,00	650.051.328.563.46	82.94
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.586.260.11	86.34
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN	322.664.639.155,00	296.371.615.565.25	91.85
Belanja Gaji Pokok ASN	178.510.321.251,00	168.930.182.615.00	94.63
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.872.129.069,00	126.612.791.456.00	95.29
Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.887.032.418,00	12.241.382.843.00	94.99
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.930.000.405,00	5.216.598.900.00	87.94
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.898.012.610,00	5.576.682.800.00	94.55
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.044.157.711,00	2.676.520.000.00	87.92
Belanja Tunjangan Beras ASN	7.869.604.894,00	7.524.182.533.00	95.61
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	300.679.031,00	244.461.987.00	81.30
Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.121.935,00	1.751.291.00	82.53
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.547.951.724,00	7.796.841.928.00	91.21
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	293.437.001,00	259.741.390.00	88.52

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	865.194.453,00	779.227.487,00	90,06
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	85.747.007.187,00	74.227.960.376,00	86,57
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.824.462.356,00	34.997.710.602,00	85,73
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	567.948.367,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	44.354.596.464,00	39.230.249.774,00	88,45
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.638.108.197,00	37.962.195.720,25	91,17
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.050.393.168,00	815.189.822,00	77,61
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	568.605.829,00	371.645.966,25	65,36
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.109.056.000,00	29.289.376.220,00	94,15
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	237.000.000,00	228.500.000,00	96,41
Belanja Honorarium	7.606.003.200,00	6.288.914.962,00	82,68
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.067.050.000,00	968.568.750,00	90,77
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.810.175.094,00	11.424.125.555,00	96,73
Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000,00	556.815.000,00	96,00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00	46.216.800,00	92.43
Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000,00	56.053.080,00	93.42
Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00	47.974.500,00	79.96
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000,00	807.381.750,00	96.12
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000,00	81.347.175,00	81.35
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.073.370.468,00	97.57
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094,00	373.819,00	53.40
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.466.600.000,00	2.467.927.514,00	100,05
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000,00	3.497.590.449,00	97.16
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00	1.575.000,00	1.58
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.490.820.446,00	1.138.296.713,00	76.35
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97.56
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00	6.120.000,00	76.50
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97.56

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000,00	5.214.240,00	63.59
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000,00	473.226,00	78.87
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624,00	1.200,00	45.73
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080,00	5.451.840,00	82.75
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83.62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83.62
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	765.458.502,00	510.562.132,00	66.70
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	544.731.976,00	457.144.795,00	83.92
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	640.000.000,00	601.599.996,00	94.00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	240.000.000,00	201.600.000,00	84.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.999.996,00	100.00
Belanja Pegawai BOS	355.599.000,00	600.000,00	0.17
Belanja Pegawai BOS	355.599.000,00	600.000,00	0.17
Belanja Pegawai BLUD	2.472.607.980,00	2.086.654.590,00	84.39
Belanja Pegawai BLUD	2.472.607.980,00	2.086.654.590,00	84.39
Belanja Barang dan Jasa	295.562.732.925,00	236.689.663.677.43	80.08

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Barang	53.870.029.927,00	41.459.336.963.41	76.96
Belanja Barang Pakai Habis	53.701.119.927,00	41.291.118.588.41	76.89
Belanja Barang Tak Habis Pakai	168.910.000,00	168.218.375.00	99.59
Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0.00	0,00
Belanja Jasa	141.427.495.208,00	118.678.611.392.38	83.91
Belanja Jasa Kantor	127.073.725.332,00	106.929.178.006.99	84.15
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.831.237.482,00	5.212.065.702.00	89.38
Belanja Sewa Tanah	122.500.000,00	67.290.000.00	54.93
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.532.515.000,00	1.071.663.000.00	69.93
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.587.600.000,00	1.815.708.128.00	70.17
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	19.000.000,00	18.000.000.00	94.74
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	805.260.000,00	651.736.717.51	80.93
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.582.433.000,00	1.333.799.159.88	84.29
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000,00	149.000.000.00	90.85
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.216.586.000,00	1.104.884.805.00	90.82

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	217.118.266,00	119.788.973,00	55.17
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	275.520.128,00	205.496.900,00	74.59
Belanja Pemeliharaan	21.653.863.867,00	15.947.872.079,00	73.65
Belanja Pemeliharaan Tanah	22.530.000,00	22.247.096,00	98.74
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.391.927.012,00	9.897.183.561,00	68.77
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.851.574.220,00	1.324.186.877,00	71.52
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.932.332.635,00	2.334.490.250,00	79.61
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.455.500.000,00	2.369.764.295,00	96.51
Belana Perjalanan Dinas	42.803.639.673,00	31.333.058.245,50	73.20
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.268.639.673,00	31.333.058.245,50	74.13
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	535.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.758.900.000,00	1.995.074.339,34	72.31
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.159.900.000,00	1.678.411.000,00	77.71
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	599.000.000,00	316.663.339,34	52.87
Belanja Barang dan Jasa BOS	13.161.820.071,00	11.688.460.588,00	88.81
Belanja Barang dan Jasa BOS	13.161.820.071,00	11.688.460.588,00	88.81

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.886.984.179,00	15.587.250.069.80	78.38
Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.886.984.179,00	15.587.250.069.80	78.38
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.307.017.43	88.84
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	355.379.000,00	239.258.707.66	67.32
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	305.379.000,00	199.821.947.66	65.43
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	50.000.000,00	39.436.760.00	78.87
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.564.211.000,0	20.081.991.319.77	88.95
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.861.740.500,00	6.517.836.555.77	94.81
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.487.470.500,00	13.350.232.164.00	86.20
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	215.000.000,00	213.922.600.00	99.50
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990.00	95.98
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990.00	95.98

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>123.125.748.792,00</b>	<b>93.038.635.113,35</b>	<b>75,56</b>
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	84,46
Belanja Modal Alat Besar	520.700.000,00	469.995.000,00	90,26

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Alat Besar Darat	113.000.000,00	69.576.000,00	61.57
Belanja Modal Alat Bantu	407.700.000,00	400.419.000,00	98.21
Belanja Modal Alat Angkutan	6.001.727.000,00	4.447.981.020,00	74.11
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.834.827.000,00	4.305.455.020,00	73.79
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	166.900.000,00	142.526.000,00	85.40
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	338.111.320,00	285.559.380,00	84.46
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.500.000,00	3.370.000,00	61.27
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	20.137.400,00	19.052.400,00	94.61
Belanja Modal Alat Ukur	312.473.920,00	263.136.980,00	84.21
Belanja Modal Alat Pertanian	5.250.000,00	1.486.000,00	28.30
Belanja Modal Alat Pengolahan	5.250.000,00	1.486.000,00	28.30
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.011.771.810,00	9.369.675.587,00	85.09
Belanja Modal Alat Kantor	1.700.012.620,00	1.580.316.798,00	92.96
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.873.629.190,00	7.399.049.289,00	83.38
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	438.130.000,00	390.309.500,00	89.09
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.624.788.000,00	1.410.960.611,00	86.84

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Alat Studio	1.263.538.000,00	1.063.487.611,00	84.17
Belanja Modal Alat Komunikasi	361.250.000,00	347.473.000,00	96.19
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	235.660.000,00	195.929.401,00	83.14
Belanja Modal Alat Kedokteran	235.660.000,00	195.929.401,00	83.14
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.385.038.625,00	2.953.248.230,00	87.24
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.838.188.000,00	2.628.236.000,00	92.60
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	74.200.000,00	73.350.000,00	98.85
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	472.650.625,00	251.662.230,00	53.24
Belanja Modal Komputer	6.546.952.700,00	5.783.630.269,80	88.34
Belanja Modal Komputer Unit	5.241.595.000,00	4.664.464.189,80	88.99
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.305.357.700,00	1.119.166.080,00	85.74
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	98.857.500,00	85.497.500,00	86.49
Belanja Modal Alat Pelindung	12.500.000,00	11.850.000,00	94.80
Belanja Modal Alat SAR	86.357.500,00	73.647.500,00	85.28

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Alat Peraga	4.016.000.000,00	3.961.150.600,00	98.63
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4.016.000.000,00	3.961.150.600,00	98.63
Belanja Modal Rambu-Rambu	271.350.000,00	269.004.310,00	99.14
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	271.350.000,00	269.004.310,00	99.14
Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00	44.440.000,00	44.44
Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00	44.440.000,00	44.44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos	4.086.445.997,00	3.958.789.627,00	96.88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos	11.757.291.515,00	8.994.427.264,00	76.50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.757.291.515,00	8.994.427.264,00	76.50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	81.80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	81.80
Belanja Modal Bangunan Gedung	28.476.691.124,00	23.412.875.823,46	82.22
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.476.691.124,00	23.412.875.823,46	82.22
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.476.691.124,00	23.412.875.823,46	82.22
Belanja Modal Monumen	77.500.000,00	0,00	0.00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	77.500.000,00	0,00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	657.934.000,00	484.798.034,06	73.68
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	657.934.000,00	484.798.034,06	73.68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	65.000.000,00	51.751.200,00	79.62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	65.000.000,00	51.751.200,00	79.62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.886.820.001,00	24.162.072.116,00	59.10
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	12.658.209.413,00	10.722.757.867,87	84.71
Belanja Modal Jalan	12.058.209.413,00	10.158.394.827,42	84.24
Belanja Modal Jembatan	600.000.000,00	564.363.040,45	94.06
Belanja Modal Bangunan Air	23.070.012.277,00	9.601.537.945,11	41.62
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.304.031.500,00	1.857.354.179,19	80.61
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.944.115.650,00	2.907.332.596,62	73.71
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	16.821.865.127,00	4.836.851.169,30	28.75
Belanja Modal Instalasi	4.881.413.311,00	3.625.697.079,79	74.28
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.037.662.793,00	3.545.868.319,79	87.82
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	843.750.518,00	79.828.760,00	9.46
Belanja Modal Jaringan	277.185.000,00	212.079.223,24	76.51

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Jaringan Air Minum	52.185.000,00	0,00	0.00
Belanja Modal Jaringan Listrik	225.000.000,00	212.079.223,24	94.26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	91.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	441.000.000,00	391.917.390,00	88.87
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	31.000.000,00	29.796.800,00	96.12
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	410.000.000,00	362.120.590,00	88.32
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	878.720.000,00	839.896.300,00	95.58
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	878.720.000,00	839.896.300,00	95.58
Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Hewan	50.000.000,00	48.400.000,00	96.80
Belanja Modal Hewan Piaraan	50.000.000,00	48.400.000,00	96.80
Belanja Modal Tanaman	1.200.000,00	1.200.000,00	100.00
Belanja Modal Tanaman	1.200.000,00	1.200.000,00	100.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.590.939.200,00	1.413.949.450,00	88.88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.590.939.200,00	1.413.949.450,00	88.88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0.00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.671.485.436,00</b>	<b>1.844.107.190,00</b>	<b>10.44</b>
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10.44
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10.44
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10.44
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(99.412.782.688,00)</b>	<b>38.597.567.724,17</b>	<b>(38.83)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>99.412.782.688,00</b>	<b>99.412.790.386,00</b>	<b>100.00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	100.00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0.00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0.00
Penghematan Belanja	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	100.00
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	56.627.376.899,00	56.627.376.899,00	100.00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	25.415.651.640,00	25.415.651.640,00	100.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	2.	3.	4.
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	17.342.997.696,00	17.342.997.696,00	100.00
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.764.151,00	100.03
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.764.151,00	100.03
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.764.151,00	100.03
PEMBIAYAAN NETTO	99.412.782.688,00	99.412.790.386,00	100.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	138.010.358.110,17	0.00

## 5. Inovasi Daerah

### a. DIMUKO (Dapur Inovasi Menu Unggulan Kuliner Objek)

SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Ringkasan Inovasi DIMUKO merupakan inovasi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di TMSBK dengan melakukan penataan dan penambahan fungsi ruang kios cendera mata yang ada di Gerbang Utama TMSBK dengan area food court yang terintegrasi tanpa mengganggu aktivitas pengunjung yang masuk. Kios cinderamata dan foodcourt yang didesain secara modern ini nanti akan didorong untuk menggunakan aplikasi e-commerce seperti Gofood, Grabfood, Shopee food serta penggunaan system pembayaran cashless menggunakan barcode. Dengan adanya inovasi ini diharapkan TMSBK dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM yang ada di gerbang utama serta dapat menjadi daya Tarik lain bagi pengunjung.

b. Aplikasi PPID Kota Bukittinggi

SKPD : Diskominfo

Ringkasan : inovasi Aplikasi PPID ini merupakan transformasi penyelenggaraan PPID dari manual menuju digital sehingga dapat menghemat penggunaan sumberdaya baik dalam hal waktu dan juga uang. Aplikasi ini juga membantu memudahkan petugas dalam memberikan respon terhadap permintaan informasi yang disampaikan oleh pemohon. Beberapa pelayanan yang bertaransformasi dari manual ke pelayanan online tersebut adalah : pencarian informasi, permohonan informasi, pengajuan keberatan, mengetahui transparansi (DPA, Laporan keuangan) dan statistic kota, serta survey kepuasan masyarakat dan Forum PPID.

c. SIPADEH

SKPD : Badan Keuangan

Ringkasan : Inovasi SIPADEH atau Sistem Informasi Penerimaan Pajak Daerah merupakan inovasi berbentuk aplikasi yang menggunakan system informasi Teknologi yang digunakan oleh petugas di Bidang pendapatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Aplikasi ini terintegrasi dengan Kas Daerah sehingga pergerakan penerimaan daerah dari sector pajak dapat dimonitor secara cepat, akurat dan realtime. Aplikasi telah memudahkan proses penyampaian pajak dari wajib pajak di Kota Bukittinggi.

d. SIDO PS (SISTEM DELIVERY ORDER PENGELOLAAN SAMPAH)

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan : Dinas Lingkungan Hidup menerapkan system DO atau Surat jalan kepada armada truk yang mengantar sampah ke TPA regional Payakumbuh Petugas DO yang ditempatkan di diperbatasan Bukittinggi-Payakumbuh di kelurahan Garegeh kecamatan mandiingin Koto Selayan. Kriteria armada yang diberikan DO apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: muatan dumptruck telah mencapai batas minimal (4 ton), adanya terpal penutup, kondisi kendaraan baik, adanya petugas pendamping ke TPA regional di payakumbuh. Dengan adanya sisten DO inipengangkutan sampah oleh armada menjadi lebih terjadwal, dimana keberangkatan dibatasi sampai jam 8 pagi dan kembali jam 10 pagi setiap harinya. System ini juga memudahkan untuk pemeliharaan dan operasional truk sehingga usia truk lebih panjang dan kondisinya juga terawat, jumlah sampah yang dibawa dapat dilakukan secara maksimal.

- e. SIKOMO (Sistem Pengolahan Kompos dan Maggot)
- SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Ringkasan : Inovasi SIKOMO berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, meningkatkan volume sampah organik yang diolah menjadi kompos dengan pemanfaatan organisme berupa Black Soldier Fly (BSF) atau ulat maggot. Untuk saat ini ada 1 (satu) Rumah kompos yang sudah beroperasi secara aktif dalam penggunaan ulat maggot untuk mengurai sampah organik menjadi pupuk, yaitu Rumah Kompos Bukit Apit Phuhun dengan kapasitas pengolahan 7,5 ton sampah perbulan dan menghasilkan 1,5 ton pupuk organik siap pakai.
- f. E-PUTRI SAYA (Elektronik Pungutan Retribusi Pasar Rakyat)
- SKPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
- Ringkasan : Inovasi e-Putri Saya merupakan transformasi metode penarikan retribusi dari yang sebelumnya dengan cara konvensional (tunai) diganti dengan e-retribusi untuk menghindari kebocoran PAD dari sector retribusi.
- g. D5/DELIMA (Layanan Daring Dokumen Dapat Dicitak di Rumah)
- SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- Ringkasan : Inovasi Delima merupakan upaya pelayanan dari Dinas Dukcapil yang mampu membahagiakan masyarakat dalam pengurusan semua dokumen (selain pelayanan peneribitan KTP dan KIA) bagi semua warga Kota Bukittinggi. Pelayanan Delima menggunakan system online menggunakan aplikasi telegram yang bias diunduh disetiap smartphone dan bebas biaya, bebas pungli dan calo. Dokumen yang bisa diurus menggunakan aplikasi delima ini adalah: KK, Surat keterangan Pindah, Akte Kelahiran, Akte kematian, Akta perkawinan, Akte perceraian. Diharapkan inovasi ini mampu mewujudkan warga masyarakat Bukittinggi yang tertib administrasi kependudukan dengan kepemilikan dokumen yang lengkap.
- h. POSTEKDA (POS Pengukuran Tekanan Darah)
- SKPD : DINAS KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS GUGUAK PANJANG)
- Ringkasan : Inovasi Postekda merupakan pembentukan pos pelayanan pengukuran tekanan darah di 4 (empat) lokasi yang dilaksanakan oleh kader dan dapat dilakukan setiap waktu. Inovasi ini lahir dari temuan bahwa hanya sekitar 21,49% penderita hipertensi di wilayah kerja

puskesmas Guguk Panjang yang melakukan pemeriksaan rutin, dimana hal ini berbahaya bagi penderita karena dapat berakibat fatal berupa kematian.

Dengan adanya inovasi Postekda, penderita hipertensi didekatkan dengan akses layanan kesehatan yang mereka perlukan, dimana penderita harus dilakukan pengecekan berkala minimal satu kali dalam sebulan, kemudian juga dilakukan penyuluhan hidup sehat dan pemberian rujukan jika saat pemeriksaan penderita sedang mengalami gangguan kesehatan dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

i. KETUPAT PAKU (PEREKAMAN KTP DI TEMPAT SAMPAI KE PINTU)

SKPD : DISDUKCAPIL

Ringkasan : Layanan Ketupat paku pada umumnya bisa dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat Kota Bukittinggi, namun pada dasarnya pelayanan ini diutamakan bagi kaum lansia, orang sakit, difable dan ODGJ yang benar-benar tidak mampu hadir secara fisik ke kantor Disdukcapil Kota Bukittinggi. Upaya jemput bola Ketupat paku ini telah berhasil memenuhi target nasional dimana setiap daerah harus melakukan perekaman e-KTP minimal 92% sedangkan program ini mampu membawa Kota Bukittinggi ke angka 93,25%.

j. BUKU JUJUR DAN KOTAK JUJUR

SKPD : DINAS PENDIDIKAN (SDN 18 TAROK DIPO)

Ringkasan : Inovasi Buku Jujur dan Kotak Jujur adalah sebuah upaya dari SDN 18 Tarok Dipo dalam memperbaiki karakter peserta didik dan memotivasi mereka untuk lebih giat menjalankan ibadah shalat dan membaca al-qur'an serta amalan lain berupa infaq, sadaqah serta berbuat baik kepada sesama. Pelaporan ibadah dengan menggunakan buku jujur sedangkan untuk kotak jujur digunakan sebagai sarana lost and found, dimana setiap benda atau uang yang hilang atau mereka temukan bias diletakkan didalam kotak jujur.

k. THE GREAT BUKITTINGGI OF RESILIENCE

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ringkasan : Inovasi Kota Bukittinggi Tangguh Bencana didesain untuk menciptakan keadaan dimana Pemerintah daerah, Badan Usaha dan segenap masyarakat mampu merespon kejadian bencana baik sebelum atau sesudah dengan penuh bijak, baik dalam penggunaan sumberdaya manusia dan kemampuan keuangan dengan tepat sehingga dapat meminimalisir resiko bencana ditengah

masyarakat.

I. HELLO PEMADAM E-113

SKPD : DINAS KEBAKARAN

Ringkasan : Hello Pemadam e-113 merupakan aplikasi yang diciptakan Dinas kebakaran sebagai sarana penghubung antara masyarakat dengan Dinas Kebakaran, terutama dalam hal pelaporan kasus kebakaran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Aplikasi hello pemadam e-113 memanfaatkan teknologi android dan sudah dapat diunduh di google playstore. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pelaporan non kebakaran seperti untuk pengendalian Hama Lebah atau ular berbisa.

m. SIRUBI (SISTEM INFORMASI RUMAH KOTA BUKITTINGGI)

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Ringkasan : Inovasi SIRUBI merupakan Inovasi berupa aplikasi yang memuat data basis data perumahan di Kota Bukittinggi secara komprehensif, valid, mutakhir dan terferivikasi sehingga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan dan program serta penentuan target serta kinerja organisasi.

Aplikasi Sirubi tersedia di jaringan android yang dapat diunduh hamper pada semua perangkat smartphome, sehingga memudahkan pengentrian data oleh petugas di lapangan. Data perumahan yang dientri meliputi: data pemilik/penghuni rumah, posisi rumah lengkap dengan titik koordinatnya, serta puluhan indicator yang menjadi syarat rumah layak huni lainnya. Data ini tersaji secara online selama 24 jam sehingga mampu mengakomodir kebutuhan dengan cepat tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Aplikasi Sirubu sudah menjadi acuan pada: verifikasi penerima bantuan Dana DAK Perumahan tahun Tahun 2021, Usulan penerima DAK Perumahan tahun 2022, Penerima Bantuan perumahan APBD Tahun 2021, Usulan Penerima Bantuan Dana Perumahan APBD Tahun 2022 dan lain-lain.

n. SIP (SISTEM INFORMASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Ringkasan : Inovasi SIP merupakan system Database PSU yang dikembangkan menggunakan teknologi berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan media software sebagai sarana infrastrukturnya pada Dinas Perkim. System ini akan mencatat seluruh data PSU di Kota Bukittinggi secara lengkap dan akurat. Data ini akan dikumpulkan dengan metode survey secara rutin dengan periode waktu

tertentu.

Inovasi SIP ini diharapkan mampu menghimpun data sekunder ataupun data eksisting PSU di Kota Bukittinggi untuk mengoptimalkan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan PSU di Kota Bukittinggi.

o. KLINIK KELUARGA BERBASIS MESJID

SKPD : KECAMATAN ABTB

Ringkasan : Inovasi ini merupakan upaya pengumpulan, verifikasi dan input data DTKS dengan menggunakan sarana masjid sebagai tempat musyawarah bersama kelurahan, lembaga dan tokoh adat dan stake holder terkait dengan pendampingan dari Dinas Sosial.

p. BINGKISAN SI GOOGLE DIMASA PANDEMI DI TAMAN KANAK-KANAK

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ringkasan : System pembelajaran yang terganggu selama pandemi mengharuskan pelaku pendidikan dan pengawas sekolah untuk melakukan transformasi. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja guru, kepala sekolah selama WFH atau BDR, tidak memungkinkan lagi dilaksanaka secara langsung. Maka digunakanlah aplikasi google form untuk pemantauan dan evaluasi tersebut di Taman Kanak-Kanak kecamatan Guguk Panjang.

q. SEKOLAH INOVASI "QR CODE SAMPAH"

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SDN 03 PAKAN KURAI)

Ringkasan : Inovasi QR Code sampah merupakan inovasi pemisahan sampah berdasarkan jenisnya di lingkungan sekolah SDN 02 Pakan Kurai menggunakan akses QR Code.

r. SEKOLAH INOVASI " MENGGUGU DAN MENIRU PRILAKU NABI MUHAMMAD SAW"

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SDN 03 PAKAN KURAI)

Ringkasan : Inovasi ini merupakan pembinaan karakter siswa dengan mengenalkan karakter Nabi Muhammad SAW untuk ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Diantara metode yang digunakan adalah dengan membuat dan memutar video yang menggambarkan sifat-sifat nabi Muhammad yang perlu ditiru siswa dan siswi dalam kehidupannya.

s. SEKOLAH INOVASI “PEMBELAJARAN BLENDER”

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SDN 03 PAKAN KURAI)

Ringkasan : Inovasi Pembelajaran Blender atau Blended Learning merupakan inovasi pembelajaran yang memadukan metode pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran jarak jauh

t. PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI PEMBELAJARAN

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TK ISLAM AL-AZHAR)

Ringkasan : Dalam rangka menciptakan metode dan proses belajar mengajar yang menarik, TK Islam Al-Azhar menciptakan inovasi pengembangan Video Animasi pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan para guru dalam menciptakan video yang menarik, TK Islam AL Azhar melaksanakan Bimbingan Teknis pembuatan video.

u. PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI BERBASIS PROYEK

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TK Alsiyah 1 Bukittinggi)

Ringkasan : Pembelajaran berbasis proyek maksudnya adalah pembelajaran yang berorientasi pada anak, dimana anak didik diberi kebebasan untuk membangun pengetahuan baru dengan cara permainan sentra peran dengan tema profesi. Anak memilih kegiatan sesuai dengan minat mereka yang beragam melalui tiga permainan yang telah disiapkan majelis guru. Proses ini nantinya akan membantu anak untuk berprinsip konstruktivistik (membangun pengetahuan baru), inquiry (memecahkan masalah melalui pembelajaran yang terintegrasi).

Proses pembelajaran berbasis proyek ini sangat berperan baik dalam hal:

1. Perkembangan nilai moral dan agama anak
2. Perkembangan social dan emosional
3. Perkembangan Bahasa
4. Perkembangan kognitif
5. Perkembangan motoric
6. Perkembangan seni

v. INOVASI APLIKASI ABSENSI BERBASIS WEB

SKPD : BPRS JAM GADANG

Ringkasan : Merupakan respon cepat dari BPRS Jam Gadang dalam rangka menghentikan perkembangan virus covid 19 di lingkungan kerja, yaitu dengan tidak lagi menggunakan absensi manual ataupun sidik jari yang digunakan secara bersama-sama. BPRS Jam Gadang menggunakan system absensi berbasis web yang nantinya juga bisa digunakan sebagai dasar penetapan upah/gaji karyawan BPRS Jam Gadang.

w. APLIKASI KLIK ASN

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Ringkasan : Aplikasi klik ASN merupakan system informasi kepegawaian berbasis jaringan internet secara online yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lain yang memanfaatkan data kepegawaian. Sehingga kebutuhan akan data kepegawaian secara cepat dan tepat dapat terlaksana. Berikut ini data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi klik ASN : rekap pegawai, rekap gologan, klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin, rekap pendidikan, rekap eselon, rekap diklat yang dilengkapi dengan data pendukung resmi yang diupload ke dalam aplikasi.

x. SIKOMO (SISTEM KONSULTASI MOBILE)

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Ringkasan : Inovasi sistem komunikasi mobile merupakan langkah yang diambil oleh PMPTSP-PTK untuk melakukan percepatan pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses atau menerbitkan NIB melalui input adata melalui link OSS RBA yang disediakan oleh BKPM menggunakan nomor telepon dan whatsapp khusus yang disediakan. Diharapkan dengan adanya inovasi ini penerbitan NIB yang bermasalah dapat diselesaikan secara cepat.

y. TOKEN (TOILET KEJUJURAN)

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / SDN 03 PAKAN KURAI

Ringkasan : Merupakan upaya sekolah untuk meningkatkan kebersihan dan sikap hidup bersih siswa-siswinya dengan menyediakan toilet dengan kondisi layak dan jumlah yang memadai. Sedangkan kejujuran siswa-siswi diharapkan saat melakukan pembayaran atas sarana yang mereka gunakan seperti tisu dan pembalut yang disediakan namun berbayar.